

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) mendefinisikan otonomi daerah sebagai “hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri”. Menurut Suseno (2013), tujuan otonomi daerah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. Ariani & Putri (2016) berpendapat bahwa Pemerintah daerah dapat beroperasi secara mandiri dengan menerima pendapatan dari pemerintah pusat. Pengelolaan Finansial daerah memainkan peran penting dalam implementasi otonomi daerah.

Pengelolaan keuangan daerah efektif, efisien, dan ekonomi memiliki dampak signifikan dalam kemajuan sebuah wilayah. Pemerintah membutuhkan pengelolaan dana yang efektif untuk memungkinkan pemerintah daerah memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan memfasilitasi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan.

Pemerintah Kota Kupang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dalam operasinya sendiri, termasuk mengatur keuangan. Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah ditunjukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

laporan keuangan terdiri dari tujuh laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Perubahan Ekuitas Laporan, dan Catatan Laporan Keuangan. Peran pemerintah daerah harus terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, diperlukan pembangunan daerah yang seimbang dan selaras, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pengelolaan anggaran negara, provinsi, kota, dan desa (APBDes) yang baik.

Tidak dapat dihindari bahwa pemerintah daerah harus memiliki kekuatan keuangan sendiri untuk menunjukkan bahwa mereka dapat membiayai semua urusan dan kegiatan administratif, termasuk pembangunan dan layanan publik, secara mandiri dan memenuhi kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi sebagai sumberpendapatan. Ruliana (2015) menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah juga dapat mengindikasikan bahwa masyarakat setempat sangat terlibat dalam pembangunan daerah. Semakin banyak masyarakat yang membayar pajak dan retribusi daerah maka menunjukkan kemandiria daerah. Ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah karena PAD lebih kecil daripada pendapatan dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat dan pinjaman daerah. Namun, ini berbeda dengan praktik beberapa

pemerintah daerah saat ini. Pemerintahan daerah telah menerima lebih banyak uang dari pada PAD dalam beberapa tahun terakhir.

Konstantin dan Wilhelmina (2022) mendukung penelitian ini, yang menyatakan dalam temuan penelitiannya menggunakan pola hubungan instruktif, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah yang menunjukkan pemerintah daerah lebih diawasi dan diatur oleh pemerintah pusat. Pekerjaan pemerintah pusat lebih penting dari pada kemandirian fiskal pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Ika, Novi dan Bintang (2019) juga dalam Studinya menunjukkan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sangat rendah.

Berdasarkan pertimbangan latar belakang dan temuan penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk memilih judul skripsi “**Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Periode 2018-2021**”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana menganalisis rasio keuangan untuk menilai kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Periode 2018-2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis rasio keuangan untuk menilai kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Periode 2018-2021.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna bagi:

a. Peneliti

Studi ini berpotensi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang penerapan teori akuntansi sektor publik, khususnya menganalisis rasio keuangan untuk Penilaian Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Periode 2018-2021.

b. Kantor Pemerintah Daerah Kota Kupang

Studi ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dan pemerintah daerah saat menilai kinerja keuangan dari pemerintah Kota Kupang dalam menganalisis kemandirian keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Kupang.

c. Universitas

Mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya Malang dapat menggunakan penelitian ini untuk meningkatkan literasi dan memperluas pengetahuan terutama dalam menganalisis kemandirian keuangan dari Pemerintah Daerah.

d. Peneliti Selanjutnya

Penelitian penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah dan menambah wawasan serta dapat menjadi perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti dengan tema sama.